

PROGRAM “SI PEMADAM TOLAK API” (PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN EVALUASI) PENYUSUNAN RKP DESA GENTONG KABUPATEN NGAWI

Program “Si Pemadam Tolak Api” (Training and Assistance in Governance, Accountability and Evaluation) Preparation of RKP Gentong Village, Ngawi

Sendy Dwi Haryanto^{1*}, Rollis Ayu Ditasari², Elva Nuraina³, Nur Ayu Amalina¹, Dina Aprilia Novitasari¹

¹Program Studi D3 Manajemen Pajak, Universitas PGRI Madiun, ²Program Studi Manajemen, Universitas PGRI Madiun, ³Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun

Jalan Auri No 14-16, Madiun, Jawa Timur

*Alamat korespondensi: sendy.dh@unipma.ac.id

(Tanggal Submission: 11 Juli 2023, Tanggal Accepted : 7 Agustus 2023)



Kata Kunci :

Pelatihan, pendampingan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi, RKP

Abstrak :

Desa Gentong merupakan desa yang berada di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan tepat sasaran dibutuhkan proses pemikiran yang matang. Inovasi yang dibutuhkan adalah belum terlaksananya tata kelola yang baik dan kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia untuk memahami perencanaan pembangunan, komputer, dan teknologi informasi. Program “Si Pemadam Tolak Api” merupakan pelatihan dan pendampingan terkait penyusunan RKP Desa berbasis *local governance* untuk berkontribusi pada SDGs. Program ini memberikan literasi dengan melakukan focus group discussion tentang kendala dalam penyusunan RKP serta memberikan pemahaman terkait Local Governance. Tujuan utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dapat mendorong kesadaran, inisiatif, dan partisipasi dari masyarakat Desa Gentong guna mencapai menjadi desa mandiri yang dapat bertindak sebagai subjek pembangunan berkelanjutan. Hasil program ini adalah pemahaman dan membangun komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa untuk berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan (SDGs). Program ini dilaksanakan berkelanjutan untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik hingga mencapai good local governance.

Program “Si Pemadam Tolak Api” merupakan solusi yang diberikan untuk pengembangan SDM dari aparaturnya desa dan perlu dilakukan setiap tahunnya agar perangkat desa dalam menyusun RKP serta RPJM sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia serta diharapkan proses pembangunan di Desa Gentong dapat berjalan secara sinergis. Program ini dilaksanakan berkelanjutan untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik hingga mencapai good local governance.

Key word :

Training, governance assistance, accountability, evaluation, RKP

Abstract :

Gentong Village is a village located in Paron District, Ngawi Regency. In preparing a transparent, accountable, participatory, orderly and targeted Village Government Work Plan (RKP Desa), a mature thought process is needed. The innovation needed is the lack of good governance and the lack of readiness of Human Resources to understand development planning, computers, and information technology. The program “Si Pemadam Tolak Api” is a training and assistance related to the preparation of local governance-based RKP Desa to contribute to SDGs. This program provides literacy by conducting focus group discussions on obstacles in the preparation of RKP and providing understanding related to Local Governance. The main purpose of this community service activity is to encourage awareness, initiative, and participation from the people of Gentong Village in order to achieve becoming an independent village that can act as a subject of sustainable development. The result of this program is understanding and building the commitment of village governments in realizing the effectiveness of village governance, improving the quality of village governance and increasing village competitiveness to contribute to sustainable development. This program is implemented continuously to ensure the implementation of the program runs well to achieve good local governance. The program “Si Pemadam Tolak Api” is a solution provided for the development of human resources from the village apparatus and needs to be carried out annually so that village officials in compiling RKP and RPJM are in accordance with applicable regulations in Indonesia and it is hoped that the development process in Gentong Village can run synergistically. This program is implemented continuously to ensure the implementation of the program runs well to achieve good local governance.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Haryanto, S. D., Ditasari, R. A., Nuraina, E., Amalina, N. A., & Novitasari, D. A. (2023). Program “Si Pemadam Tolak Api” (Pelatihan Dan Pendampingan Tata Kelola, Akuntabilitas Dan Evaluasi) Penyusunan Rkp Desa Gentong Kabupaten Ngawi. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1317-1327. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1013>

PENDAHULUAN

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia menyebabkan masyarakat dituntut untuk mandiri dalam segala hal, dimana salah satunya yakni dalam hal perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa memerlukan proses penilaian dan pengumpulan data objektif dan faktual mengenai kondisi dinamika masyarakat desa (Hendrawati et al., 2021). Dari data tersebut memberikan gambaran terkait potensi dimiliki meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana, dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi oleh desa. Sesuai dengan permendagri



Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwasanya desa wajib membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM dimana untuk jangka waktu 6 tahun dan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDesa untuk jangka waktu 1 tahun.

Dokumen RPJM dan RKP Desa disusun melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diusulkan oleh Pemerintah desa kepada Pemerintah daerah kabupaten (Ngancar, 2020)(Zaenudin, Harsono, & Wahyunadi, 2023). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan dokumen penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 tahun dimana memuat kebijakan-kebijakan pembangunan desaan memfokuskan pada visi, misi serta tujuan desa (Ngancar, 2020). Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar untuk menyusun APBD Desa dimana ditetapkan pada peraturan kepala desa yang bersangkutan dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahan evaluasi kinerja tahunan pemerintah desa (Tiza & Taus, 2019).

Desa Gentong merupakan desa yang berada di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Dimana untuk mewujudkan optimalisasi pembangunan maka setiap tahunnya pemerintah desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Ra'is & Rini, 2022; Sari, Sholihah, & Wanusmawatie, 2022; Zaenudin et al., 2023). RKP Desa Gentong disusun oleh Pemerintah Desa maksimal pada bulan Juli berjalan dan disahkan dengan peraturan desa paling lambat pada bulan September. Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan tepat sasaran dibutuhkan proses pemikiran yang matang, dimana proses tersebut seorang kepala desa harus melibatkan subjek pembangunan dalam menyusun RKP Desa, yang memiliki kualifikasi, kompetensi, serta profesionalitas yakni diantaranya perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Kunahyo & Dharmakarja, 2022; Lutfi, Safitri, Rukmanawati, Anwar, & Kabib, 2020; Meme et al., 2022). Namun demikian saat ini Desa Gentong menghadapi permasalahan yakni belum terlaksananya tata kelola yang baik dan kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia untuk memahami perencanaan pembangunan, komputer, dan teknologi informasi. Keikutsertaan masyarakat juga perlu dilakukan sebagai alat guna memperoleh informasi yang faktual terkait kondisi dan kebutuhan sehingga dana tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat (Yulianti, Alviani, Muchlisun, Al Umar, & Anwar, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 2 terkait Pedoman Pembangunan Desa bahwa agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, ada tujuh tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RKP dan RPJM diantaranya: penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa. Atas dasar itu, tim pengabdian memperkenalkan Program "Si Pemadam Tolak Api" (Pelatihan Dan Pendampingan Tata Kelola, Akuntabilitas Dan Evaluasi) kepada tim penyusun Desa Gentong yang terdiri dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang baik sehingga *Good Local Government* dapat tercapai (Machfiroh, 2019)(Meme et al., 2022).

Pada dasarnya desa merupakan sumber kekuatan ekonomi nasional dimana masih banyak potensi yang perlu digali. Bila digarap secara profesional maka dapat menjadikan penggerak utama roda ekonomi nasional. Program "Si Pemadam Tolak Api" merupakan solusi yang diberikan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia untuk aparat desa dan perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah Desa sehingga tuntutan masyarakat akan pelayanan dapat memuaskan. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan aparat desa perlu adanya identifikasi jenis

- b. Menjelaskan materi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menggunakan metode ceramah dan diskusi, Adapun sistematika adalah sebagai berikut:
- Langkah 1 (Metode Ceramah): Peserta yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, beserta perwakilan masyarakat Desa Gentong. diberikan materi terkait tata kelola desa yang baik (good governance) serta diberikan pemahaman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri No 114 Tahun 2014.
 - Langkah 2 (Metode Diskusi/Sesi Tanya Jawab): Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang selama ini mereka dihadapi. Pada akhir kegiatan peserta diberikan kuisioner untuk mengetahui pemahaman mereka terkait materi yang telah diberikan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan selama 4 jam (08.00-12.00 WIB). Untuk menyusun RKP Desa dibutuhkan analisis data terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi yang faktual di Desa Gentong, sehingga pada saat pelatihan peserta dan tim pengabdian masyarakat langsung mendiskusikan mengenai permasalahan yang dihadapi. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perangkat desa, Ketua BPD Desa Gentong, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang berpengaruh di Desa Gentong dimana terdiri dari 20 orang yang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, antara lain:

1. Sebagai penyedia tempat kegiatan pengabdian
2. Sebagai peserta pengabdian yang mengikuti seluruh kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakukan selama 3 Bulan, pada bulan April - September 2023 (Dua Tahap). Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tahap-tahap yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu :

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	KUNJUNGAN			
		I	II	III	IV
1	Survei Lokasi	√			
2	Analisis Permasalahan	√			
3	Langkah-Langkah Kegiatan :				
	a. Persiapan		√		
	b. Waktu dan Tempat		√		
	c. Metode Kegiatan			√	
	d. Pendampingan Kegiatan			√	
	e. Laporan Akhir				√
	f. Publikasi hasil penelitian abdimas				√

Berdasarkan permasalahan mitra sebelumnya, tim pengabdian masyarakat akan memberikan solusi dengan pelaksanaan Program “Si Pemadam Tolak Api” dalam bentuk pelatihan dan pendampingan terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan pemerintah, memberikan informasi tambahan dan melakukan *focus group discussion* tentang kendala dalam penyusunan RKP Desa serta memberikan pemahaman terkait *Good Local Government*. Peningkatan pemahaman dan komitmen pemerintahan desa, didukung dengan pemberian materi terkait kontribusi desa terhadap pembangunan keberlanjutan (SDGs) pada tahun 2030, kemudian materi yang kedua terkait efektivitas local governance pada penyusunan RKP Desa Gentong. Tahapan

program yang bersifat keberlanjutan untuk memastikan implementasi dari program ini dapat berjalan dengan baik dan untuk mencapai output program desa yang berdaya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan dokumen penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 tahun dimana memuat kebijakan-kebijakan pembangunan desaan memfokuskan pada visi, misi serta tujuan desa (Ngancar, 2020). Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar untuk menyusun APBD Desa dimana ditetapkan pada peraturan kepala desa yang bersangkutan dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahan evaluasi kinerja tahunan pemerintah desa (Tiza & Taus, 2019).

Desa Gentong merupakan desa yang berada di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Dimana untuk mewujudkan optimalisasi pembangunan maka setiap tahunnya pemerintah desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKP Desa Gentong disusun oleh Pemerintah Desa maksimal pada bulan Juli berjalan dan disahkan dengan peraturan desa paling lambat pada bulan September. Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan tepat sasaran dibutuhkan proses pemikiran yang matang (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022; Meme et al., 2022; Ulupui et al., 2022), dimana proses tersebut seorang kepala desa harus melibatkan subjek pembangunan dalam menyusun RKP Desa, yang memiliki kualifikasi, kompetensi, serta profesionalitas yakni diantaranya perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Namun demikian saat ini Desa Gentong menghadapi permasalahan yakni belum terlaksananya tata kelola yang baik dan kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia untuk memahami perencanaan pembangunan, komputer, dan teknologi informasi. Keikutsertaan masyarakat juga perlu dilakukan sebagai alat guna memperoleh informasi yang faktual terkait kondisi dan kebutuhan sehingga dana tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat (Wardhani, Suhdi, Yunita, & Yusnita, 2022; Yulianti et al., 2020).



Gambar 1. Pelaksanaan Pemaparan Materi Tata Kelola Penyusunan RKP Desa Gentong

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan membangun komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa untuk berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan (SDGs). Atas dasar itu dalam sosialisasi program ini, pengabdian

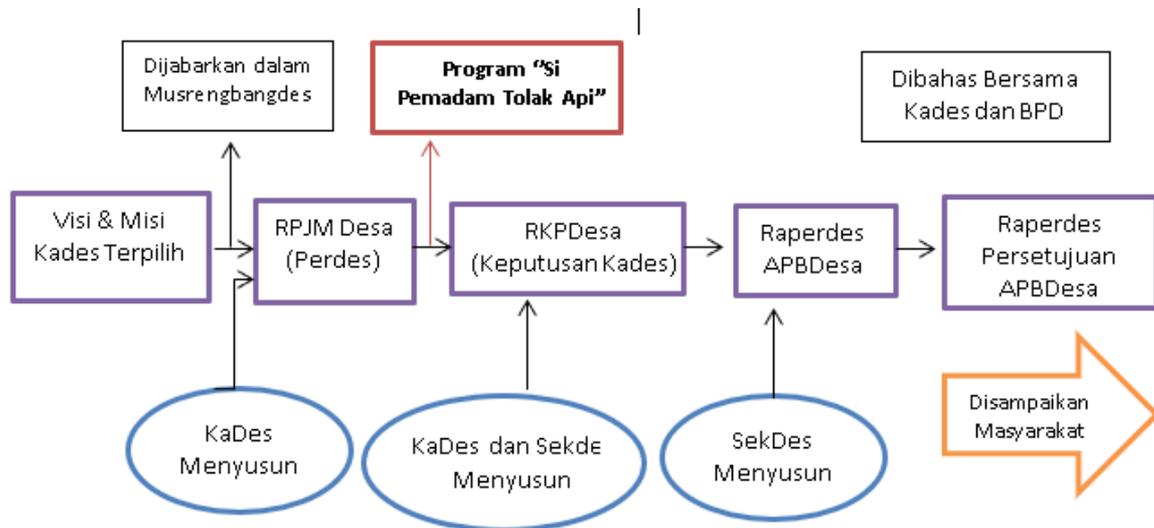
memberikan literasi pemahaman terkait kontribusi desa terhadap pembangunan keberlanjutan (SGDs) melalui penyusunan RKP Desa berbasis local governance sehingga dapat berdaya saing. Materi yang pertama adalah, bagaimana peran penyusunan RKP desa itu berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan pembangunan keberlanjutan (SGDs). Penekanan dari materi ini adalah dimana program kerja yang disusun harus searah dengan kebutuhan pembangunan desa, pembangunan desa yang terukur dan berpola untuk menjadi desa yang mandiri, makmur dan sejahtera melalui mengoptimalkan potensi desa Gentong.



Gambar 2. Pengurus dan peserta Palaksanaan Pemaparan Materi Tata Kelola Penyusunan RKP Desa Gentong

Selanjutnya, peningkatan komitmen ini dikuatkan dengan pemahaman pemerintah desa dalam aspek local governance dalam penyusunan RKP desa. Proses penyusunan harus melibatkan pemangku kepentingan desa untuk mengetahui bagaimana kebutuhan desa yang selaras dengan potensi desa yang dimiliki. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP merupakan aspek penting untuk pemenuhan aspek admnisitrasi, pembagian tugas untuk mendorong aspek transparansi sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Tata kelola desa yang baik didasarkan dari bagaimana komitmen pemerintah desa untuk menuju desa yang berdaya saing, yakni mempersiapkan RKP berdasarkan local governance yang berkaitan dari aspek tatanan nilai yang tepat untuk mengatasi masalah sumber daya aparat pemerintah desa.

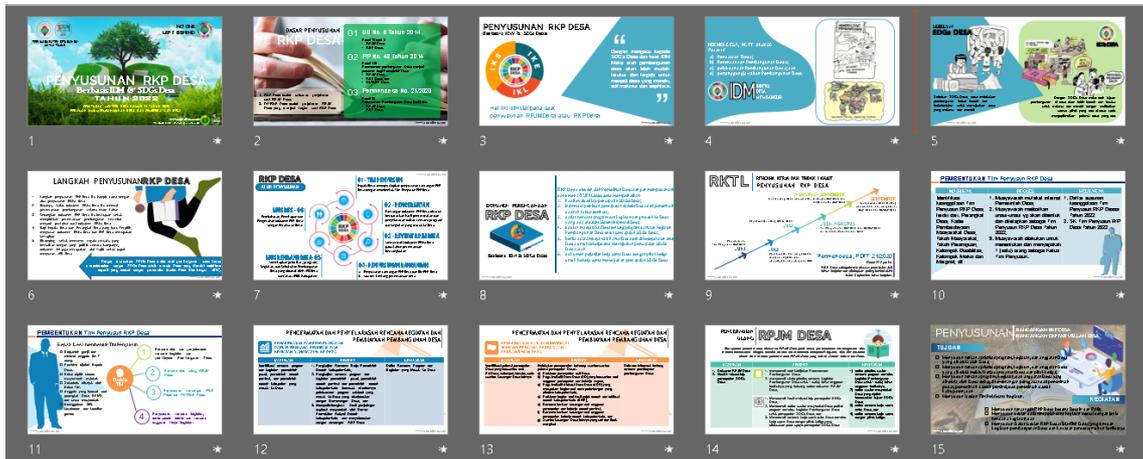
Program "Si Pemadam Tolak Api" merupakan solusi yang diberikan untuk pengembangan SDM dari aparat desa dan perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah Desa sehingga tuntutan masyarakat akan pelayanan dapat memuaskan. Pelatihan ini melibatkan kepala desa Gentong, Kepala BPD Desa Gentong, beserta pemangku kepentingan di Desa Gentong. Seperti Gambar 1, aparat inti desa melakukan pemaparan materi terkait tata kelola penyusunan RKP Desa dan menganalisis realisasi RKP Desa 2022 dengan data tahun sebelumnya untuk mencari program yang lebih baik untuk dilanjutkan, ditambah, dikurangi dan sebagainya. Sehingga, sifat Rencana Kerja Pemerintah Desa tidaklah 'harga mati' tetapi juga bukan dengan mudah diubah ataupun diganti program/kegiatannya.



Gambar 3. Proses Penyusunan RKPDes

Berdasarkan permasalahan mitra sebelumnya, tim pengabdian masyarakat akan memberikan solusi dengan memberikan Program “Si Pemadam Tolak Api” yakni pelatihan dan pendampingan terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan pemerintah, memberikan informasi tambahan dan melakukan *focus group discussion* tentang kendala dalam penyusunan RKP Desa serta memberikan pemahaman terkait *Good Local Government*. Untuk itu salah satu tujuan tim pengabdian yakni pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dapat lebih terarah, dimana tim mempelajari terlebih dahulu RKPDesa di tahun sebelumnya program yang terlaksana dan belum terlaksana serta pagu indikatif desa Gentong. Mekanisme pengelolaan APBD Desa Gentong secara keseluruhan terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan : Perencanaan pembangunan keuangan desa yaitu proses perencanaan penerimaan dan pengeluaran dana desa pada tahun berjalan yang dianggarkan dalam RKP Desa. Pada tahapan ini akan dilakukan evaluasi dan penyusunan RPJM melalui Musdes ataupun Musrengbangdes. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta dapat mewujudkan *Good Governance*.
- Pelaksanaan : Pelaksanaan APBD Desa Gentong, seluruh pengeluaran maupun penerimaan menggunakan Rekening Kas Desa dimana disesuaikan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pelaporan : Dimana setiap tahunnya pelaporan APBD Desa Gentong disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Gentong oleh Kepala desa kepada Bupati melalui camat.
- Pertanggungjawaban : Selain disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Gentong , Camat, dan Bupati, Laporan APBD Desa juga dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui *banner* yang dipasang di depan kantor desa maupun di titik tertentu pada lingkup desa, dan *website* resmi Desa Gentong.

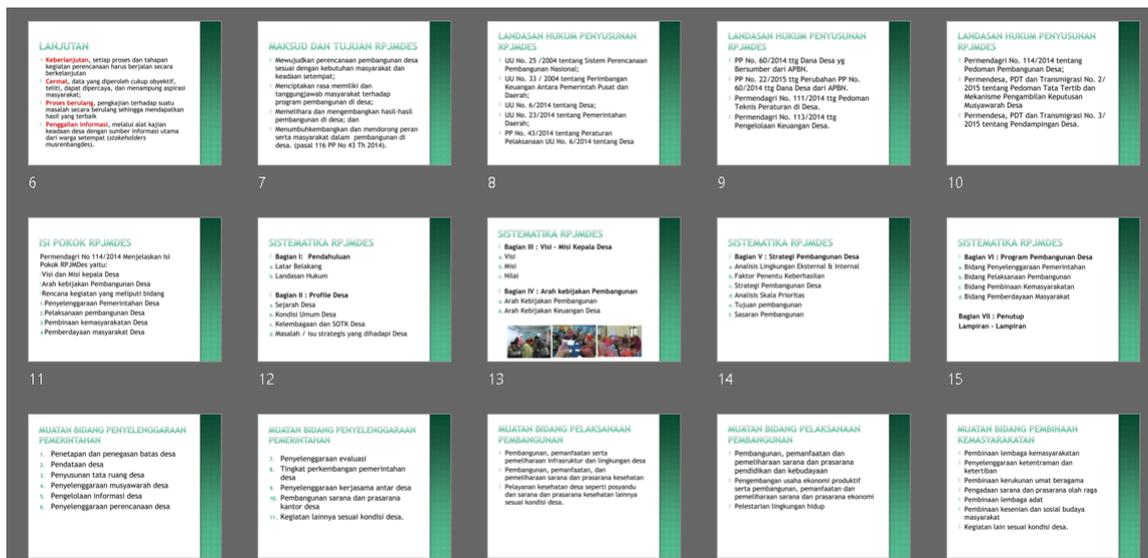


(Sumber : diolah peneliti, 2023; <https://www.ciptadesa.com/>)

Gambar 4. Slide materi 1 terkait relevansi RKP dan Pembangunan keberlanjutan tingkat desa

Sebelum materi dilakukan serangkaian pre test untuk mengetahui pemahaman peserta atau selaku aparat desa kepada beberapa pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan tersebut terkait tentang :

- 1) Pemahaman konsep desa dan *Good Local Government*
- 2) Pemahaman terkait perencanaan pembangunan desa
- 3) Pemahaman terkait masalah pembangunan desa
- 4) Pemahaman terkait komunikasi dalam pemerintahan
- 5) Pemahaman terkait peraturan desa
- 6) Pemahaman terkait RKPDesa



(Sumber : diolah peneliti, 2023; <https://www.ciptadesa.com/>)

Gambar 5. Slide materi 1 terkait relevansi RKP dan Pembangunan keberlanjutan tingkat desa

Selama kegiatan pengabdian berlangsung peserta kegiatan sangat antusias berpartisipasi dalam pelaksanaan dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan serta keterlibatan dalam berdiskusi dan terdapat beberapa peserta yang berminat untuk belajar mengenai sistematika penyusunan RKP Desa. Pelaksanaan pelatihan berjalan dengan lancar sampai akhir, namun beberapa peserta utamanya yang duduk di baris belakang masih nampak kurang kidmat mengikuti dimana berbicara dan tertawa dengan sesama peserta disebelahnya pada saat pemaparan materi.

Setelah dilakukan pemaparan materi oleh tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap program “Si Pemadam Tolak Api” sehingga dapat dilakukan kembali di Desa Gentong atau bahkan bisa digunakan di instansi lainnya untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sehingga tepat guna dan sesuai dengan sasaran pengabdian. Berdasarkan implementasi sebanyak dua tahap pelaksanaan, dimana hasil program ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang dipahami oleh aparat pemerintahan Desa Gentong sangat bagus, dilihat dari atensi forum discussion group yang aktif menagjukan pertanyaan dan mengajukan studi kasus. Hasil forum discussion group ini didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat, dimana akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyusunan RKP periode selanjutnya. Di akhir acara sebagai bentuk perwujudan rasa terimakasih dan juga kerjasama dengan peserta kegiatan, tim pengabdian memberikan cinderamata berupa plakat UNIPMA yang diterima secara langsung oleh Kepala Desa Gentong, Paron, Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program “Si Pemadam Tolak Api” merupakan solusi yang diberikan untuk pengembangan SDM dari aparat desa dan perlu dilakukan setiap tahunnya agar perangkat desa dalam menyusun RKP serta RPJM sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia serta diharapkan proses pembangunan di Desa Gentong dapat berjalan secara sinergis. Kegiatan abdimas ini telah memberikan kontribusi yang baik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapan Sumber Daya Manusia untuk memahami proses penyusunan RKP dan RPJM sehingga tata kelola pemerintahan desa belum terlaksana dengan baik dan dalam proses pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur. Program ‘Si Pemadam Tolak Api’ perlu diharapkan dapat berlanjut setiap tahun sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah Desa sehingga tuntutan masyarakat akan pelayanan dapat memuaskan. Diharapkan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambahkan agar tujuan dan manfaat kegiatan dapat tercapai sepenuhnya dan adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan yang sejenis selalu diselenggarakan secara periodik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Madiun atas Hibah Internal 2023 Skim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kantor Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299-319.
- Lestari, S. M., & Wahyuningsih, Y. E. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). *Jurnal Sosial Sains*, 1(10), 453–458. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/235%0Ahttps://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/download/235/475>
- Lutfi, I. A., Safitri, D. E., Rukmanawati, M., Anwar, S., & Kabib, N. (2020). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Periode 2016-2018. *Jurnal Abdi Insani*, 7(1), 79-86
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Meme, R., Wulandari, C. A. N., Nanang, Q., Sri, S., Abdurrohman, A., Rida, R., Magdalena, S. S. (2022). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik)*: Eureka Media Aksara: Purbalingga.
- Ngancar, P. D. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 memuat program kerja*



Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngancar Kecamatan Plaosan melalui Peraturan Desa.

- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2022). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD). *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 7(2), 123-130
- Sari, Y. K., Sholihah, Q., & Wanasmawatie, I. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Kajian Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro pada Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 214-224
- Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik*, 28(1), 29–39.
- Susi, W. R., Suhdi, S., Yunita, A., & Yusnita, M. (2022). Training Dan Asistensi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Karya Makmur Sungailiat Kabupaten Bangka. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1808-1814. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i4.736>
- Ulupui, I. K. A., Pahala, I., Hasanah, N., Nindito, M., Jaya, T. E., Muliasari, I., & Zairin, G. M. (2022). Pelatihan Akuntansi Desa Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Cisaat Kab. Subang Jawa Barat. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 2(2) 108-112
- Tiza, A. L., & Taus, W. (2019). Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Lemun Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. *Sabdamas*, 1(1), 271–277. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/sabdamas/article/view/1016>
- Yulianti, L. A., Alviani, A. W., Muchlisun, M., Al Umar, A. U. A., & Anwar, S. (2020). Optimalisasi Dana desa Melalui Analisis Pembelanjaan Di Desa Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdi Insani*, 7(1), 19-26
- Wardhani, R. S., Suhdi, S., Yunita, A., & Yusnita, M. (2022). Training dan asistensi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Karya Makmur Sungailiat Kabupaten Bangka. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1808-1814
- Zaenudin, Z., Harsono, I., & Wahyunadi, W. (2023). Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDES) Terhadap Tingkat Pembangunan di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(4), 140-150